

## PENGAWASAN

### TAHUN 2014

#### A. Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

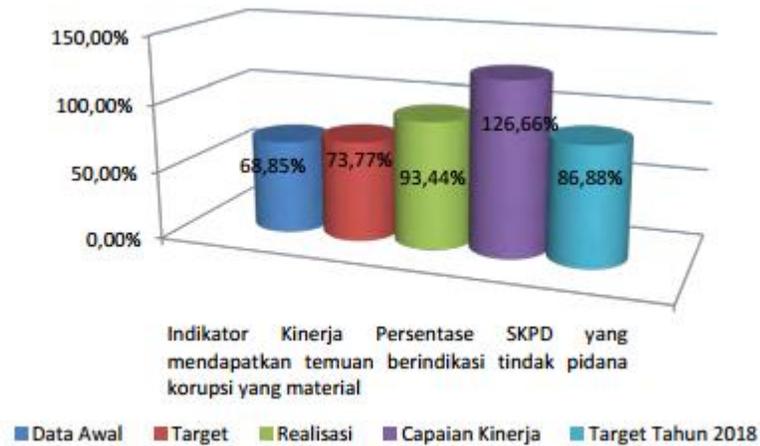
Selama tahun 2014 telah terjadi penurunan kasus berindikasi tindak pidana korupsi. Penurunan terjadi pada jumlah SKPD yang mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi. Dengan meningkatnya jumlah SKPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi, secara langsung akan menyebabkan terjadinya penurunan temuan berindikasi tindak pidana korupsi tersebut.

Kriteria indikator ini adalah SKPD yang memiliki temuan BPK RI yang material sebesar  $\geq 1\%$  dan SKPD dikatakan tidak lagi mendapatkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material, jika SKPD tersebut pada tahun penetapan pencapaian indikator, tidak lagi memiliki temuan BPK RI yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang terbit pada tahun tersebut. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non kumulatif. Capaian Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material yang merupakan indikator kinerja dari sasaran Menurunnya temuan pemeriksaan kasus berindikasi tindak pidana korupsi secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Realisasi sd Tahun 2014	Target Tahun 2018 (Akhir RPJMD)
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4/5)	(7)	(8)
1.	Persentase SKPD yang mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	Persentase	73,77%	93,44%	126,66%	93,44%	86,88%

Target di tahun 2014 adalah sebesar 73,77% (45 SKPD dari 61 SKPD) yang tidak mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material dan realisasinya adalah sebesar 93,44% (57 SKPD dari 61 SKPD). Dengan demikian, masih terdapat 4 (empat) SKPD yang masih memiliki temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi (berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013). Capaian realisasi dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Sasaran Menurunnya Temuan Pemeriksaan Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Capaian realisasi indikator Persentase SKPD yang mendapatkan temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material, tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun lalu, karena indikator ini merupakan indikator yang baru ada di tahun 2014 dan juga tidak memiliki pembandingan dengan instansi lain, baik dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Barat maupun Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat.

Telah banyak upaya yang dilakukan, baik oleh Inspektorat melalui APIP Inspektorat maupun dalam bentuk kerjasama dengan KPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Peran APIP dalam melaksanakan pengawasan adalah sebagai Quality Assurance, Consulting Partner dan Catalyst yang diimplementasikan melalui kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan umum (general audit) yang mengacu kepada isu strategis yang ada pada saat itu. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi) dapat diketahui melalui temuan hasil pemeriksaan yang muncul pada setiap SKPD pada saat pemeriksaan oleh APIP Inspektorat Kota Bandung. Diharapkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas eksternal, kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah berkurang atau tidak ada sama sekali dengan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan perundang-undangan dari SKPD.

Kerjasama dengan KPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah kegiatan sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Sasaran dari Kegiatan tersebut adalah SKPD dan APIP Inspektorat. Bahkan di Tahun 2014 Pemerintah Kota Bandung mendapatkan prestasi yaitu:

1. Penghargaan Gratifikasi sebagai Pemerintah Daerah dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik Tahun 2014;
2. Penghargaan Gratifikasi sebagai Pemerintah dengan Jumlah Laporan Gratifikasi Terbanyak dan 100% Tepat Waktu Tahun 2014.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, yaitu :

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan

- Pengawasan Internal secara Berkala dan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan;
2. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

## **B. Meningkatnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

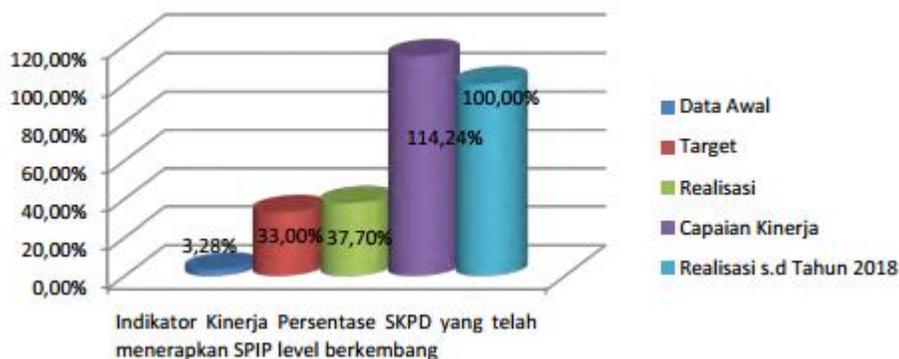
Di tahun 2014 SPIP telah dilaksanakan oleh SKPD di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi SPIP harus ditunjang dengan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku dan semakin tingginya integritas aparatur pemerintah. Kriteria dari SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang, diukur dari persentase SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif.

Adanya SOP dapat memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayanan publik melalui perbaikan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam tahapan level berkembang, SKPD telah mulai menyusun infrasutruktur dalam pengendalian kegiatan. Infrastruktur yang dimaksud dalam indikator ini adalah adanya SOP pada setiap SKPD. Dari 61 (enam puluh satu) SKPD, yang telah membuat SOP sebanyak 23 (dua puluh tiga) SKPD (37,70%). Capaian Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang yang merupakan indikator kinerja dari sasaran Meningkatnya implementasi SPIP secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi SPIP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Realisasi sd Tahun 2014	Target Tahun 2018 (Akhir RPJMD)
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4/5)	(7)	(8)
1.	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang	Persentase	33,00 %	37,70%	114,24%	37,70%	100%

Selama tahun 2014, di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, SKPD yang telah menyusun SOP sebesar 37,70% (23 SKPD dari 61 SKPD) dari target sebesar 33% (20 SKPD dari 61 SKPD). Dengan demikian, capaian realisasi indikator kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Sasaran Meningkatnya Implementasi SPIP

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan :
  - (1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;
  - (2) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
  - (3) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;
  - (4) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
  - (5) Penyelesaian Reformasi Birokrasi.
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

### **C. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal**

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar 82,31% (tidak mencapai target) dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti dengan capaian kinerja sebesar 100% (realisasi sesuai dengan target). Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif. Tercapainya sasaran kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar. Dengan demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan internal maupun eksternal secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Realisasi indikator kinerja Secara rinci, capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

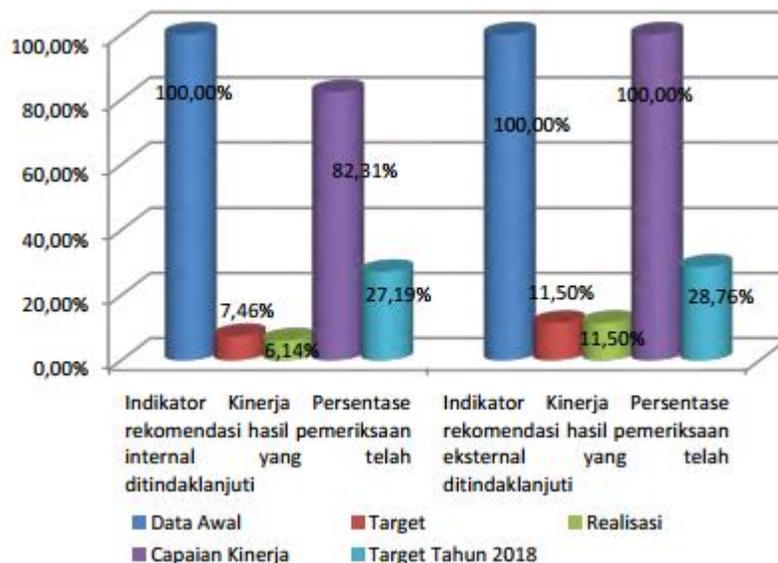
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Realisasi sd Tahun 2014	Target Tahun 2018 (Akhir RPJMD)
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4/5)	(7)	(8)
1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	Persentase	7,46%	6,14%	82,31%	6,14%	27,19%
2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	Persentase	11,50%	11,50%	100%	11,50%	28,76%

Data awal dalam sampai dengan tahun 2013 sebesar 100% (terdapat 228 rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti dan belum mendapat status penyelesaian tindaklanjut “Selesai (S)”. Ke-228 (dua ratus dua puluh delapan) rekomendasi tersebut terdiri dari:

1. Pemeriksaan Reguler (Komprehensif), sebanyak 38 (tiga puluh delapan) rekomendasi;
2. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, sebanyak 190 (serratus sembilan puluh) rekomendasi.

Pada tahun 2014 persentase rekomendasi yang ditargetkan untuk mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut “Selesai” adalah sebesar 7,56% (17 rekomendasi). Akan tetapi realisasinya hanya sebesar 6,14% (14 rekomendasi). Dengan demikian target dari indikator ini tidak dapat tercapai. Akan tetapi meskipun realisasi capaian indikator ini tidak memenuhi target, jika dibandingkan dengan data awal, masih terdapat penurunan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti, yaitu sebesar 6,14% (dari 100% menjadi 93,86%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 3. Grafik Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Penyebab utama tidak tercapainya target Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti salah satunya adalah adanya rekomendasi yang berhubungan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah yang membutuhkan waktu yang agak lama dalam menindaklanjutinya (untuk mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut selesai). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyampaikan kembali surat untuk melakukan pemutakhiran data kepada SKPD dimaksud, yaitu melalui surat :

1. Nomor 700/255-Insp, tanggal 6 Mei 2014 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Nomor 700/254-Insp, tanggal 6 Mei 2014 kepada Direktur Utama PD. Pasar Bermartabat;
3. Nomor 700/253-Insp, tanggal 6 Mei 2014 kepada Direktur Utama PD. Air Minum;
4. Nomor 700/252-Insp, tanggal 6 Mei 2014 kepada Direktur Utama PD. BPR;
5. Nomor 700/251-Insp, tanggal 6 Mei 2014 kepada Direktur RSKIA;
6. Nomor 700/250-Insp, tanggal 6 Mei 2014 kepada Sekretariat DPRD;
7. Nomor 700/198-Insp, tanggal 8 April 2014 dan Nomor 700/256-Insp, tanggal 6 Mei 2014 kepada Dinas Pendidikan.

Selain dengan melakukan pemutakhiran data, upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengundang setiap SKPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membentuk Tim Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut bagi setiap SKPD.

Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Tindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan.

Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti realisasinya mencapai target. Yang dimaksud dengan rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dalam indikator kinerja ini yaitu hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi pada data awal yang tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat (sampai dengan tahun 2013), temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sudah seluruhnya mendapatkan status

tindaklanjut selesai. Dengan demikian terdapat 403 (empat ratus tiga) rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti dan belum mendapat status penyelesaian tindaklanjut “Selesai (S)”, yang merupakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.